



## Berpeluang Periksa Menpera

### Kasus Proyek Rumah Khusus di Kalbar

**PONTIANAK** - Penyidikan Pembangunan Proyek Rumah Khusus yang diduga kuat bermasalah di Kalbar sangat mungkin memanggil pihak yang lebih tinggi seperti Menteri Perumahan Rakyat. Hanya itu semua tergantung hasil proses penyidikan lebih lanjut.

Aspidsus Kejati Kalbar, Didik Istiyanta menuturkan tidak mau berandai-andai. "Tergantung hasil penyidikan nantinya. Kami tidak berbicara sistematis atau tidaknya proyek ini. Kalau memang hasil penyidikan sampai

ke sana, pasti kami akan periksa. Yang pasti, Kejaksaan Tinggi Kalbar tidak mau berandai-andai," katanya.

Menurut Didik, di Kalbar, untuk sementara proses penyidikan Kejati Kalbar mengenai Proyek Rumah Khusus, sebarannya ada tujuh lokasi. Kejati Kalbar masih memeriksa proyek-proyek tersebut. "Yang pasti tidak semua dari 7 lokasi ada penyimpangan. Sejauh ini baru di Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang sudah ditetapkan tiga tersangka," ujarnya.

Kemudian untuk Panitia Pembuat Komitmen (PPK) sementara hanya satu ditetapkan tersangka. Wanita berinisial S sebagai Pejabat PPK di Kemenpera sudah ditahan. S tercatat sebagai PPK

Proyek Rumah Khusus untuk wilayah Kalimantan Barat.

Kejati Kalbar sebelumnya juga menahan dua tersangka dugaan korupsi di Kementerian Perumahan Rakyat yakni Tri, Direktur Utama PT. Pilar Persada dan Ek, Cabang PT. Pilar Persada di Pontianak. Keduanya ditahan atas kasus korupsi proyek pelaksanaan pembangunan perumahan khusus Kemenpera tahun anggaran 2012 di Jagoi Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Kalbar.

Sementara seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan? Didik menyampaikan hasil auditnya belum tergambar. Yang pasti Kejati Kalbar masih

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

## Berpeluang Periksa Menpera

**Sambungan dari Halaman 16**

bekerjasama sama BPKP atau BPK wilayah Kalbar. Namun berdasarkan hasil penyelidikan tim Kejaksaan di lapangan, kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar.

Ketua Umum DPP LAKI-Burhanudin Abdullah melaporkan dan menyerahkan secara resmi data-data proyek rumah khusus lain ke Kepala

Seksi Penyidik Kejati Kalbar. "Kami sudah melaporkan proyek rumah khusus tersebut," ungkap dia.

LAKI memiliki alasan tersendiri. Pertama dari empat kabupaten dengan beberapa titik lokasi, tercatat ada daerah tidak memenuhi target. Kemudian struktur rumah khusus ternyata tidak sesuai motede. "Misalnya dari spek yang kami peroleh struktur bangunan

rumah khusus untuk TNI, Polri dan PNS Sipil tersebut struktur bangunannya anti gempa dengan bangunan rangka baja," ujarnya.

Kenyataan di lapangan, lanjutnya, struktur bangunan sangat tidak sesuai dengan aslinya. Yang dipakai adalah rangka kayu dengan batako sederhana. "Itulah kenapa kami laporkan ke Kejati Kalbar lagi," ujarnya. (den)